

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN OBJEK PARIWISATA ALAM PANTAI KOMPI DI KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA

LITHA MARIA TANOD

WILLIAM A. AREROS

VERY Y. LONDA

Abstrak

Kabupaten Minahasa memiliki potensi alam yang dapat dikembangkan untuk menunjang sektor pariwisata. Pantai yang ada di wilayah Kecamatan Kombi merupakan salah satu potensi alam yang saat ini menjadi salah satu alternatif masyarakat berwisata. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan objek pariwisata alam Pantai Kombi di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dalam pengembangan kajian sumber daya pembangunan khususnya konsep implementasi kebijakan.

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, Observasi dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu pimpinan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa, Pimpinan Kecamatan Kombi, pemilik dan pengelola objek wisata serta pengunjung. Fokus penelitian yaitu pada ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana serta lingkungan ekonomi dan sosial. Analisis data dilakukan melalui tahap kategorisasi data, reduksi data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan.

Temuan Penelitian bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa belum memiliki kebijakan yang menjadi dasar hukum yang jelas dalam pengembangan pengelolaan objek wisata di Pantai Kombi. Sumberdaya manusia pengelola objek wisata milik desa belum memiliki kemampuan yang baik serta belum didukung dengan ketersediaan fasilitas penunjang dan anggaran untuk pengelola objek wisata menjadi lebih baik. Keadaan ini berbeda dengan pengelolaan objek wisata milik pribadi yang memiliki sumberdaya manusia yang cukup profesional, fasilitas objek wisata yang lebih baik serta pengelolaan anggaran yang profesional. Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa yang tertata dengan baik belum mampu merumuskan dan memprogramkan pembangunan yang menunjang pengelolaan objek wisata alam pantai Kombi sebagai salah satu destinasi wisata alam yang menjanjikan sebagai akibat dari sistem perencanaan dan penganggaran daerah yang terjadi saat ini. Sikap terbuka yang ditunjukkan oleh pimpinan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa untuk memberikan kewenangan kepada desa pemilik objek wisata dalam pengelolaan model desa wisata belum menjadi program Pemerintah Kabupaten Minahasa. Komunikasi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan dengan pemilik objek wisata yang ada di Pantai Kombi dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata belum berjalan dengan baik. Masyarakat yang ada di sekitar objek wisata pantai Kombi belum menjadikan sektor pariwisata sebagai profesi untuk mendukung perekonomian keluarga karena kunjungan wisata belum secara periodik terjadi setiap hari.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pengelolaan; Pariwisata

IMPLEMENTATION OF KOMBI BEACH NATURAL TOURISM OBJECT MANAGEMENT POLICY IN MINAHASA REGENCY, NORTH SULAWESI PROVINCE

Abstract

Minahasa regency has natural potential that can be developed to support the tourism sector. The beach in Kombi sub-district is one of the natural potentials that is currently one of the alternati people traveling. This research was conducted to analyze the implementation of natural tourism object management policy of Kombi Beach in Minahasa Regency of North Sulawesi Province in the development of development resources studies especially the concept of policy implementation.

This research uses qualitative design. Data is collected through interviews, observations and documentation studies. The informants in this study were the head of the Tourism and Culture Office of Minahasa Regency, the Head of Kombi District, the owner and manager of tourist attractions and visitors. The focus of the research is on the size and objectives of policies, resources, characteristics of implementing agents, attitudes or tendencies of the executives, communication between organizations and implementing activities as well as the economic and social environment. Data analysis is done through data categorization, data reduction, data interpretation and conclusion drawing.

Research findings that the Tourism and Culture Office of Minahasa Regency does not yet have a policy that becomes a clear legal basis in the development of tourism object management in Kombi Beach. Human resources management of tourist attractions owned by the village does not have good ability and has not been supported by the availability of supporting facilities and budget for the management of tourist attractions to be better. This situation is different from the management of privately owned tourist attractions that have professional human resources, better tourist facilities and professional budget management. The organizational structure of the well-organized Tourism and Culture Office of Minahasa Regency has not been able to formulate and program development that supports the management of kombi beach natural attractions as one of the promising natural tourist destinations as a result of the current regional planning and budgeting system. The open attitude shown by the head of the Tourism and Culture Office of Minahasa Regency to give authority to the village owners of tourist attractions in the management of the tourism village model has not been a program of the Minahasa Regency Government. Communication between the Tourism and Culture Office of South Minahasa Regency and the owner of tourist attractions in Kombi Beach in the management and development of tourist attractions has not gone well. The people around Kombi beach tourism object have not made the tourism sector as a profession to support the family economy because tourist visits have not periodically occurred every day.

Keywords: Policy Implementation; Management; Tourism

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata di Indonesia adalah sektor yang menjanjikan. Saat ini pariwisata berada pada peringkat keempat dalam menghasilkan devisa terbesar Indonesia setelah minyak dan gas (migas), batu bara dan minyak sawit. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata menargetkan pariwisata Indonesia pada posisi 30 besar tingkat global. Dengan target tersebut maka Kementerian Pariwisata diharapkan memberikan kontribusi sebesar lima belas persen perekonomian nasional dengan serapan tenaga kerja tiga belas juta dan perolehan devisa dua ratus tujuh puluh lima triliun. Sehingga untuk dapat pada posisi tersebut segala potensi pariwisata di Indonesia diupayakan untuk dikembangkan dengan baik.

Pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai percepatan pengembangan pariwisata dalam rangka meningkatkan target devisa dari sektor pariwisata melalui kunjungan wisatawan serta percepatan pengembangan destinasi wisata di Indonesia. Berbagai langkah telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang antara lain melalui pembentukan sekretariat bersama percepatan pengembangan pariwisata, pembangunan berbagai infrastruktur penunjang sektor pariwisata, pengembangan atraksi wisata, meningkatkan kualitas amenities di daerah destinasi wisata, memperkuat promosi pariwisata nasional dan daerah, investasi dan pembiayaan dalam pengembangan destinasi wisata.

Potensi sumber daya alam yang sangat baik sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi Bangsa Indonesia telah memberikan dampak yang besar dalam pembangunan. Sehingga dalam upaya pemanfaatannya, baik pemerintah pusat maupun daerah memanfaatkan potensi sumber daya alam ini sebagai salah satu objek pariwisata. Hal ini juga yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Minahasa yang berada di Provinsi Sulawesi Utara.

Kabupaten Minahasa sebagai salah satu daerah yang telah lama ada di Provinsi Sulawesi Utara dalam kepemimpinan pemerintahan saat ini sebagaimana visi dan misinya yaitu berupaya menjadikan Kabupaten Minahasa yang maju dalam ekonomi dan sejahtera yang salah satu kegiatan unggulan yaitu dalam membangun fasilitas pariwisata di sekitar pantai timur dan pantai barat. Pembangunan ini diarahkan untuk percepatan pengembangan dan pengelolaan objek pariwisata alam pantai. Hal ini sejalan dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) dan Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dalam fokus pengembangan pariwisata .

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa, rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) dan Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa nyata terlihat bahwa saat ini menjadikan potensi sumber daya alam yang dimilikinya sebagai andalan sektor pariwisata. Fakta lapangan menunjukkan bahwa setidaknya terdapat tiga objek pariwisata alam yang dimiliki oleh Kabupaten Minahasa yaitu objek alam wisata Bukit Kasih, objek wisata alam Danau Tondano dan Objek wisata alam Pantai Kombi (Tondano Pante).

Tiga potensi sumber daya alam yang dijadikan objek wisata dinilai belum secara baik dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa, atau dapat juga disebutkan Pemerintah Kabupaten Minahasa kelihatannya belum serius menjadikan objek wisata alam ini sebagai destinasi utama. Asumsi ini sejalan dengan kenyataan dalam pengamatan peneliti sebagaimana terlihat ketika kita mengunjungi objek wisata tersebut.

Objek wisata alam Bukit Kasih yang berada di antara Kecamatan Kawangkoan, Kecamatan Kawangkoan Barat dan Kecamatan Tompaso dalam wilayah

Kabupaten Minahasa seakan dibiarkan begitu saja untuk dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam pengelolaannya saat ini diperhadapkan dengan masalah. Sebab melalui unit pelaksana teknis yang ada melibatkan pemerintah desa sekitar yang adalah bagian dari perangkat pemerintahan Kabupaten Minahasa, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Minahasa tidak mendapatkan kontribusi yang berarti. Pemeliharaan dan pengembangan objek wisata inipun tidak dilakukan sehingga kelihatan seperti dibiarkan begitu saja oleh pemerintah provinsi.

Objek wisata alam yang kedua yaitu Danau Tondano yang terletak di wilayah Kecamatan Tondano, Kecamatan Kakas, Kecamatan Romboken dan Kecamatan Eris. Kondisi alam Danau Tondano saat ini yang mulai ditutupi oleh eceng gondok dengan berjalan waktu akan menjadikan tempat ini sebagai kenangan. Di sekitaran danau yang terdapat air panas alamia serta situs budaya Benteng Moraya tidak tersentu oleh program pemerintah Kabupaten Minahasa. Demikian juga dengan rumah makan yang ada di sekitar danau yang tidak dilibatkan oleh instansi terkait dalam kegiatan promosi pariwisata.

Objek wisata alam yang ketiga yaitu daerah pantai kombi atau yang sering dikenal dengan sebutan “tondano pante”. Hamparan ombak, pasir yang indah serta pantai yang belum tercemar dengan sampah serta alam yang sejuk dan tenang merupakan aspek – aspek potensi yang dimiliki objek wisata ini. Akan tetapi sangat disayangkan dalam pengelolaannya belum terlihat keberadaan pemerintah kabupaten di dalamnya.

Potensi pariwisata alam yang dimiliki oleh Kabupaten Minahasa perlu untuk dikelola dengan baik guna menopang target pemerintah daerah dan pusat dalam pengembangan potensi pariwisata. Jika dilihat dari dasar kebijakan yang ada telah sangat jelas terlihat dalam kebijakan yang ada di Kementerian Pariwisata maupun dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

serta Rencana Strategis Dinas Pawirisata dan Kebudayaan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan objek pariwisata alam khususnya yang ada di pantai kombi (Tondano Pante) belum sebagaimana yang ada di daerah lain.

Akibat dari tidak cakupnya Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mengelola potensi pariwisata alam yang dimiliki menjadikan daerah ini telah tertinggal dibandingkan dengan daerah – daerah hasil pemekaran seperti Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon yang sangat setius memanfaatkan potensi pada sektor pariwisata. Hal ini bukan hanya berdampak pada pendapatan dan pembiayaan daerah, akan tetapi juga pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan infrastruktur daerah.

Berpijak pada fenomena diatas, maka dianggap penting untuk lakukan pengkajian secara ilmiah melalui proses penelitian. Dengan memperhatikan wilayah masalah yang sangat luas maka dalam penelitian ini dibatasi pada objek wisata pantai yang ada di wilayah Kombi dan sekitarnya (Tondano Pante). Pembatasan ini dilakukan agar penelitian ini akan lebih terfokus dan mendalam dalam melakukan pengkajian dan penguungkapan masalah yang ada. Suatu harapan atas usulan penelitian ini yaitu ditemukannya akar permasalahan pada pengelolaan objek pariwisata alam di Kabupaten Minahasa dan dibuatkannya suatu model yang akan dijadikan pijakan dalam penerapan pelaksanaan pengelolaan objek pariwisata alam. Sehingga dari capaian nanti akan juga merupakan bagian dari pengembangan sumber daya pembangunan khususnya dalam kajian manajemen administrasi publik melalui analisis konsep implementasi kebijakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dan Dimensi Implementasi Kebijakan

Telaah mengenai implementasi kebijakan publik harus dipahami dari kata kebijakan publik. Londa & Dengo (2017) mengemukakan bahwa kebijakan public yang merupakan pengalihan-bahasa dari “public policy”, dalam perkembangannya dewasa ini telah menjadi studi yang semakin menarik perhatian pelbagai kalangan, terutama setelah banyak pihak yang menolak paham dikotomi (pemisahan) antara “politik dan administrasi”.

Secara konseptual implementasi kebijakan publik merupakan salah satu bagian dalam siklus proses kebijakan. Secara etimologi, implementasi berasal dari istilah bahasa Inggris “*to implement*”. Pressman and Wildavsky sebagaimana dalam Londa & Dengo (2017)) “*to implement*” atau mengimplementasikan berarti “*to provide the means of carrying out*” atau menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu; “*to give practical effect to*” menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, atau *to accomplish, to fulfill, to produce, to complete*. Kata implementasi disamping sebagai kata kerja (*verb*) juga harus mempunyai sebuah obyek (*object*) yaitu kebijakan (*policy*).

Agustino (2016) mengemukakan bahwa secara sederhana implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses menterjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan.

Konsep dan Dimensi Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola (Salim dan Salim 2002) yang berarti memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusahakan supaya lebih baik dan sebagaimana serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tertentu. Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata .kelolah. (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses

mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Pendapat Pamudji diatas mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada dua faktor penting yaitu : Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi, Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan. Admosudirjo (2005:160) mendefinisikan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Dari pengertian diatas Admosudirjo menitikberatkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Lebih lanjut Moekijat (2000:1) mengemukakan pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber – sumber lain.

Tinjauan Tentang Pengembangan Pariwisata

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan

pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan.

Defenisi pariwisata menurut Yoeti (1996:108) adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan hidup guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beranekaragam

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata. (Swarbrooke 1996;99) Terdapat beberapa jenis pengembangan, yaitu :

1. Keseluruhan dengan tujuan baru, membangun atraksi di situs yang tadinya tidak digunakan sebagai atraksi.
2. Tujuan baru, membangun atraksi pada situs yang sebelumnya telah digunakan sebagai atraksi.
3. Pengembangan baru secara keseluruhan pada keberadaan atraksi yang dibangun untuk menarik pengunjung lebih banyak dan untuk membuat atraksi tersebut dapat mencapai pasar yang lebih luas, dengan meraih pangsa pasar yang baru.
4. Pengembangan baru pada keberadaan atraksi yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pengunjung atau mengantisipasi meningkatnya pengeluaran sekunder oleh pengunjung.
5. Penciptaan kegiatan-kegiatan baru atau tahapan dari kegiatan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dimana kegiatan tersebut memerlukan modifikasi bangunan dan struktur.

METODE PENELITIAN

Objek dan Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pada pengelolaan objek pariwisata alam Pantai Kombi di Kabupaten Minahasa. Telaah atas objek penelitian ini karena pariwisata yang menjadi andalan pemerintah daerah dalam hal penerimaan belum mampu memanfaatkan potensi alam yang ada. Hal ini sejalan dengan fakta pada lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Minahasa. Potensi pariwisata alam Pantai Kombi (Tondano Pante) belum dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penggunaan jenis penelitian ini sejalan dengan tujuan yaitu untuk menganalisis pengelolaan objek pariwisata alam Pantai Kombi Kabupaten Minahasa. Upaya dalam mengungkapkan makna pada pengelolaan objek pariwisata akan dapat dilakukan ketika tahapan penelitian dilakukan dengan menggunakan desain kualitatif. Data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi dianalisis secara induktif (Moleong, 1997) sehingga dapat ditemukan akar penyebab masalah dan akan memudahkan untuk dikemukakan rekomendasi perbaikan. Dengan demikian, metode penelitian pendekatan kualitatif ini adalah untuk memahami bagaimana proses dan mengungkapkan makna dari setiap fenomena secara khas dan mendalam sebagaimana objek penelitian dengan dukungan teoritik yang ada dan dibangun konsep teori yang ada.

Fokus Penelitian

Penelitian yang menggunakan desain kualitatif diarahkan pada pengungkapan makna yang mampu menemukan akar penyebab permasalahan. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka diperlukan penelitian yang terfokus pada objek. Maka untuk dapat menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan objek pariwisata alam

Pantai Kombi di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dalam pengembangan konsep implementasi kebijakan penelitian ini difokuskan pada:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi dan sosial

Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang diperoleh dalam menungkapkan fenomena yang dijadikan obyek penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari informan berupa informasi dan data hasil wawancara dengan pihak yang memiliki pengetahuan dan bertanggung jawab serta merupakan bagian dari pengelolaan objek pariwisata alam Pantai Kombi di Kabupaten Minahasa. Data sekunder adalah data dan berbagai informasi yang diperoleh melalui penelusuran yang berasal dari berbagai kajian literatur dan dokumen terkait, melalui kegiatan studi kepustakaan dan studi dokumen berupa artikel, jurnal, studi literatur, dokumen berupa laporan-laporan dan foto-foto, data statistik, arsip baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat serta publikasi media massa yang memiliki hubungan dengan objek pariwisata alam di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.

Informan

Informan dalam penelitian merupakan semua pihak yang berkepentingan dan terkait dengan objek pariwisata alam di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Prosesnya wawancara yang dilaksanakan secara mendalam dilakukan secara bebas dan tidak berstruktur. Adapun informan yang rencananya akan diwawancarai dalam penelitian ini merupakan perwakilan dari unsur :

1. Pimpinan Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa : 1 Orang
2. Pimpinan Kantor Camat Kombi Kabupaten Minahasa : 1 Orang
3. Pelaku pariwisata di sekitar objek wisata alam Pantai Kombi Kabupaten Minahasa : 3 Orang
4. Masyarakat yang ditemui di di sekitar objek wisata alam Pantai Kombi Kabupaten Minahasa : 2 Orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Wawancara. Wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan dengan para informan. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada informan. Wawancara dilakukan berlangsung dalam suasana penuh persahabatan dan kekeluargaan, mirip dengan percakapan informal. Peneliti tidak saja melakukan wawancara secara tata muka, tetapi juga wawancara melalui telepon seluler (*handphone*).
- b) Observasi. Observasi atau pengamatan langsung di lapangan yang berkaitan dengan pengelolaan objek pariwisata alam Pantai Kombi di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.
- c) Studi Kepustakaan (Dokumentasi). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan bacaan berbagai buku, teori, jurnal, makalah ilmiah, dokumen, termasuk berbagai peraturan dan bahan rujukan lainnya yang dianggap relevan dengan pariwisata alam di Pantai Kombi Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini berpijak pada model analisis yang dikemukakan oleh Miles, M dan M. Huberman (1984) yaitu berikut :

1. Kategorisasi dan mereduksi data.
2. Data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga data berbentuk rangkaian informasi yang bermakna kategorisasi dan reduksi data.
3. Melakukan interpretasi pada data yang telah dikelompokkan berdasarkan hasil kategorisasi dan reduksi sehingga mendapatkan makna yang sebenarnya sebagai ungkapan nyata atas masalah yang sebenarnya terjadi.
4. Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah.
5. Melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan, yang didasarkan pada kesimpulan tahap keempat.

Tahap analisis data dimulai sejak memasuki lapangan untuk melakukan penelitian. Tahap pekerjaan lapangan ini meliputi memahami latar penelitian dan persiapan peneliti, memasuki lokasi dan obyek penelitian, melakukan wawancara dan pengamatan serta hasil dari dokumen yang dikumpulkan. Melakukan pengamatan secara mendalam terhadap masalah penelitian dikaitkan dengan fenomena yang ada, melakukan wawancara mendalam dengan informan dalam hal pariwisata alam di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan reduksi data yakni proses pemilahan, focusing dan penyederhanaan catatan lapangan. Reduksi dilakukan dengan cara membaca transkrip, wawancara, catatan pengamatan atau dokumen yang dianalisis lalu membuat catatan atau memo atas data, ringkasan dan membuat pengelompokan data dan dibuatkan partisinya. Setelah direduksi dilakukan penampilan data. Salah satu langkah penting selanjutnya adalah menampilkan data berupa kumpulan data informasi yang terorganisir untuk selanjutnya dilakukan pembuatan kesimpulan. Tampilan data ini berupa teks, gambar, tabel, bagan dan

teks naratif atau kutipan. Tahap ini diakhiri dengan perumusan kesimpulan walaupun sudah dilakukan sejak data pertama terkumpul. Pada tahapan analisis data peneliti juga melakukan diskusi dalam bentuk focus group discussion, mengikuti seminar nasional baik sebagai pembicara maupun sebagai peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Kecamatan Kombi yang berada di Kabupaten Minahasa selain terkenal dengan hasil pertanian berupa cengki juga terkenal dengan keindahan alam pantai. Kata Kombi diambil dari istilah nama sejenis siput sungai yaitu kolombi (kolobi) yang ditemukan pada lokasi pecanangan pemukiman kampung Kombi sekitar tahun [1830](#) di tepi [sungai](#) yang mengalir dari pegunungan Lembean yang selanjutnya itu disebut Sungai Kombi. Wanua (kampung Kombi), didirikan sebagai tempat pemukiman baru yang penduduknya berasal dari arah pantai Raker (sebelah timur desa Sawangan Kombi saat ini), karena alasan tertentu pindah ke lokasi baru (tepatnya jalan Liningaan Kombi saat ini), sedangkan pemukiman disebelah barat sebagai pemukiman baru bagi penduduk yang berasal dari kampung Sesolongen (sebelah desa Rerer), kemudian menetap di Kombi arah barat yang saat ini disebut Sesologen yang pada waktu itu masih berstatus desa/kampung yang berdiri sendiri, terpisah dengan kampung Kombi. Kemudian dengan alasan efisiensi dan kesatuan digabung menjadi satu dengan sebutan Negeri Kombi (lihat sejarah Negeri Kombi dan pasasti peringatan 100 tahun Negeri Kombi Tahun 1933). Nama Kombi saat ini digunakan sebagai nama Kecamatan sebagai Kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Eris sejak tahun 1962, di samping sebagai nama desa di dalam wilayah Kecamatan Kombi. Posisi Kombi berada pada titik sentral dari arah Kota Tondano ke Kota Kema, atau dari Desa Tulap ke Desa Rerer dan Makalisung Kecamatan Kombi.

Kecamatan Kombi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Minahasa Nomor: PEM.1 / 3/ 34 /63 tertanggal 26 November 1963 tentang: pembagian Wilayah Administrasi Distrik Bawah Eris dan Kombi dan diresmikan pada tanggal 12 Desember 1963. Kecamatan Kombi adalah salah satu dari 25 Kecamatan di Kecamatan Kombi adalah salah satu dari 25 Kecamatan di Kabupaten Minahasa yang letak geografisnya berada di sebelah Utara garis khatulistiwa antara 0.30 –40.30° LU dan 121-127°BU dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, suhu maximum dan minimum 34°C/24°C. Memiliki 13 desa, 55 jaga dengan luas wilayah: 12.130 Ibukota Kecamatan berkedudukan di Desa Kombi.

PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan objek pariwisata alam Pantai Kombi di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dalam pengembangan kajian sumber daya pembangunan khususnya konsep implementasi kebijakan. Dadas teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan dari Donal Van Meter & Carl Van Horen sebagaimana dijelaskan dalam Agustino (2016) yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Wilayah Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa bukan hanya terkenal dengan hasil pertanian berupa Cengkih akan tetapi juga memiliki potensi alam berupa keindahan laut dengan pesisir pantai yang sangat indah. Saat ini pantai Kombi menjadi perhatian para masyarakat umum untuk berwisata pantai. Dari data yang ada setidaknya terdapat dua belas lokasi wisata pantai yang dikelola oleh desa maupun pribadi. Kedua belas lokasi wisata tersebut adalah Pantai Kawis, Pantai Tulap, Pantai Toloun, Pantai Pantera, Pantai Kombi, Pantai

Tumpa, Pantai Pakewa, Pantai Bulotoan, Pantai Abe, Pantai Makalisung, Pantai Tinggian, Pantai Triple M. Adapun fasilitas penunjang yang dimiliki selain akses jalan yang dari arah Kema Kabupaten Minahasa Utara yang sudah bagus, didalam lokasi wisata terdapat pondokan, penginapan, kamar mandi, WC, tempat parkir serta sarana peribadatan berupa kanisah gereja dan mesjid. Fasilitas lainnya yang juga terdapat di lokasi wisata yaitu dermaga dalam proses pembuatan, tempat pengembangbiakan penyu dan ada juga tempat pemeliharaan buaya.

Dengan menggunakan data yang diperoleh baik melalui wawancara kepada informan, pengumpulan data sekunder serta pengamatan di lapangan dapat dianalisis beberapa hal yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan dalam penelitian ini berkaitan dengan isi kebijakan yang digunakan oleh para implementor dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan objek wisata alam yang dalam hal ini objek wisata pantai di wilayah Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. Adapun dasar kebijakan pengembangan objek wisata pantai di Kecamatan Kombi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa yaitu Visi dan Misi Buati dan Wakil Bupati, RTRW Kabupaten Minahasa, Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Minahasa dan Program Kerja Dinas. Memperhatikan dasar kebijakan ini terlihat dengan jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum memiliki dasar kebijakan yang kuat sebagai payung hukum untuk menetapkan program pembangunan di sektor pariwisata.

Fakta lapangan diatas tidak sejalan dengan target Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dalam pemerintahan saat ini. Pemerintah Kabupaten Minahasa tidak menjadikan potensi pesisir pantai yang ada di wilayah Kecamatan Kombi sebagai peluang investasi dalam

pengembangan daerah. Hal ini sangat nyata karena belum diikuti dengan peraturan atau program yang jelas dan terarah.

Keadaan yang terjadi di wilayah Kecamatan Kombi sehubungan dengan pengembangan objek wisata tidak dapat disalahkan kepada Pemerintah Kecamatan Kombi, sebab Pemerintah Kecamatan Kombi bukan sebagai pembuat ataupun pelaksana program pengelolaan dan pengembangan objek wisata pantai kombi. Pemerintah Kecamatan Kombi sebagai unit kerja yang menjalankan fungsi koordinasi baik dengan desa maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sehubungan dengan pembangunan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat maupun pada keamanan dan ketertiban.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa pada dasar kebijakan pengelolaan maupun pengembangan objek wisata alam juga dihadapi oleh Pemerintah Desa yang ada di wilayah Kecamatan Kombi. Desa – Desa yang adalah pemilik objek wisata pantai di Wilayah Kombi belum memiliki peraturan desa yang berkaitan dengan pengelolaan objek wisata. Demikian pula halnya dengan tidak ada kebijakan atau program kerja desa yang terfokus pada pengembangan dan pengelolaan objek wisata pantai atau Desa Wisata. Pada situasi yang demikian menjadikan pemerintah desa selaku pemilik objek wisata maupun juga berperan sebagai pengelola mengalami kesulitan dalam pengelolaan objek wisata yang ada.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam penelitian ini lebih difokuskan pada sumberdaya manusia sebagai pengelola objek wisata, ketersediaan sarana di dalam lokasi wisata maupun sarana penunjang menuju ke tempat wisata serta dukungan anggaran atau dana. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa selaku instansi pemerintah yang diberi kewenangan dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata di Kabupaten

Minahasa memiliki pegawai sebagai sumber daya manusia cukup dan tanggap dalam menjalankan tugas. Pegawai yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa sesuai dengan kompetensi, pengalaman dan menempati jabatan sebagaimana struktur organisasi yang ada. Akan tetapi potensi sumber daya ini tidak dapat berjalan secara maksimal karena tidak diikuti dengan kejelasan program yang berkaitan langsung pada pengelolaan objek wisata alam pantai Kombi.

Data lapangan menunjukkan bahwa sumber daya manusia untuk pengelola objek wisata milik pribadi berasal dari keluarga atau pekerja yang diperkerjakan oleh pemilik objek wisata. Para pekerja yang ada di lokasi objek wisata milik pribadi digaji oleh pemilik objek wisata tersebut. Pembagian kerja juga terlihat sangat jelas dan terlihat tertata dengan baik. Hal ini berbeda dengan temuan yang diperoleh di objek wisata milik desa.

Sumber daya manusia untuk pengelola objek wisata milik desa berasal dari aparat desa dan masyarakat desa yang ditunjuk oleh hukum tua. Para pengelola bekerja seperti bahasa tiba masa tiba akal. Mereka bekerja secara tiba – tiba dan satu orang berperan pada semua kerja. Keadaan ini terkadang membingungkan para tamu atau wisatawan yang berkunjung di objek wisata tersebut.

Memperhatikan dua fakta yang berbeda dalam kaitan dengan sumber daya manusia pengelola objek wisata, maka dianggap penting jika para pengelola dibekali dengan pengetahuan yang jelas akan pekerjaan dan kepercayaan pada bidang pekerjaan secara spesifik agar memudahkan siste kerja. Dengan tertatanya sistem kerja maka akan terlihat profesional pengelolaan objek wisata tersebut. Sehingga akan semakin menimbulkan ketertarikan bagi pengunjung untuk berkunjung di objek wisata tersebut.

Permasalahan sarana juga berkaitan dengan dukungan anggaran atau dana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak

ada dukungan anggaran/dana yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa untuk pengelolaan objek wisata milik pribadi maupun milik desa. dana yang digunakan oleh pemilik objek wisata pribadi bersumber dari dana pribadi. Sementara untuk objek wisata milik desa bersumber dari retribusi masuk dan penggunaan fasilitas serta adanya dukungan anggaran dari dana desa.

Dana yang diperoleh dari retribusi masuk dan penggunaan fasilitas di objek wisata milik desa digunakan untuk membayar pengelola dan pengadaan fasilitas objek wisata. dalam situasi yang masih sangat kurang penerimaan maka dengan sendirinya juga anggaran yang tersedia dalam pengelolaan objek wisatapun sedikit atau kurang. Untuk menjadikan objek wisata baik dan menarik diperlukannya dukungan anggaran untuk memenuhi, memperbaiki dan merawat fasilitas penunjang yang ada di objek wisata. Fasilitas yang ada di objek wisata masih sederhana dan banyak yang belum sesuai dengan standart keamanan dan kenyamanan, sebab akibat dari kurangnya dukungan anggaran yang dimiliki oleh desa selaku pemilik objek wisata.

Sekalipun adanya dukungan fasilitas jalan menuju ke lokasi wisata yang cukup baik hanya jalan yang dari arah Minahasa Utara (Kema) menuju Kabupaten Minahasa Tenggara telah baik akan tetapi jika fasilitas di lokasi wisata kurang mendukung maka akan membuat animo pengunjung berkurang. Apalagi dilihat dari dukungan fasilitas jalan dari Tondano melewati Eris dan Kombi belum baik (sempit dan banyak yang rusak). Pengunjung juga banyak yang datang dari Tondano maupun Tomohon, bahkan ada juga pengunjung dari Manado datang ke Kombi melalui jalur Tondano ataupun ketika pulang melewati jalur jalan tersebut. Ketidaknyamanan yang dirasakan akan sangat mengganggu kesan para pengunjung yang ada. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Minahasa jika memang serius menjadikan sektor pariwisata sebagai salah

satu sektor unggulan di Kabupaten Minahasa. Sebab harus diakui bahwa objek wisata pantai di wilayah Kecamatan Kombi sangat menjanjikan dan dapat dijadikan daerah wisata andalan Kabupaten Minahasa. Pemerintah Daerah yang saat ini lebih terfokus pada perizinan dan retribusi dari sektor pariwisata dari pada memperbaiki ataupun melengkapi sarana penunjang pariwisata perlu diperbaiki. Sebab dengan adanya dukungan fasilitas seperti jalan dan fasilitas penunjang lainnya maka akan juga menjadikan banyak daerah wisata baru berkembang yang berdampak pada peningkatan perizinan dan penambahan retribusi daerah.

Keadaan yang turut memperlemah pengelolaan objek wisata di wilayah Kombi dimana tidak ada objek wisata penunjang yang menjadi penyangga objek wisata pantai Kombi. Demikian pula dengan sangat kurang sarana rumah makan maupun penginapan yang memiliki standart nasional. Salah satu yang ada saat ini hanyalah gunung rerumputan yang dinamakan "padang teletabis". Akan tetapi untuk menuju ke lokasi tersebut para pengunjung akan melewati jalan yang sempit, berbukit dan rusak. Situasi ini membuat wisatawan menjadi tidak nyaman.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana dalam penelitian ini terlihat dari struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa maupun pengelolaan dari desa dan pribadi. Secara struktur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa memiliki unit kerja dalam pengembangan objek wisata. Unit kerja dalam pengembangan objek wisata yaitu Bidang Sumber Daya Wisata. Akan tetapi data lapangan menunjukkan bahwa Bidang Sumber Daya Wisata belum mampu mengaktualisasikan visi dan misi pemerintah daerah pada pengembangan objek wisata pantai Kombi.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa belum memfokuskan program pembangunan sektor pariwisata di

Pantai Kombi secara serius yang terlihat dari program kerja yang ada saat ini. Kegiatan – kegiatan yang ada lebih pada penguatan promosi pariwisata bukan pada pembangunan sarana wisata. Akan menjadi mubasir ketika ada kunjungan wisatawan akan tetapi menjadi mengecewakan karena tidak di dukung dengan pembangunan di daerah wisata yang memadai.

Keadaan dalam pengelolaan objek wisata sehubungan dengan karakteristik agan pelaksana juga ditelaah dari pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa selaku pemilik objek wisata. Para pengelola yang adalah juga aparat desa dan masyarakat desa yang ditunjuk oleh hukum tua tidak diikuti dengan mekanisme kerja yang selas dan terstruktur. Para pengunjung mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang objek wisata karena tidak adanya kejelasan pada bidang kerja yang dimiliki oleh mereka yang bertugas di lokasi objek wisata.

Perbedaan dalam pengelolaan sangat nyata dibandingkan dengan pengelola objek wisata milik pribadi. Objek wisata milik pribadi masih lebih tertata dibandingkan dengan dengan yang dikelola oleh desa. Karakteristik para pelaksana menjadi penting dalam pengelolaan objek wisata. Semakin baik dan tertatanya pala pelaksana dalam hal pembagian kerja maka akan semakin menunjukkan profesionalisme kerja dalam pengelolaan objek wisata.

4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap atau kecenderungan para pelaksana pada penelitian ini lebih difokuskan dalam hal sikap yang ditunjukkan oleh para pelaksana dalam melayani pengunjung yang ada. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selaku pelaksana sangat terbuka dengan setiap masukan yang ada. Dari berbagai informasi yang berkembang sehubungan dengan peran dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disikapi secara bijaksana oleh kepala dinas. Akan tetapi oleh karena untuk dapat melaksanakan program kerja berproses melalui perencanaan dan anggaran

daerah maka dengan sendirinya pula Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupateb Minahasa mengalami kesulitan dalam merealisasikan visi dan misi pimpinan.

Hal yang dianggap baik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selaku pelaksana memiliki kemampuan adalah dalam memahami kondisi yang ada sehingga ada usulan rencana untuk memberikan bantuan fasilitas objek wisata serta berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangkang pengembangan BUMDes Desa Wisata untuk menunjang sektor pariwisata. Hal ini diakui oleh pimpinan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak dapat dilakukan sendiri karena Desa memiliki kewenangan sendiri dalam pengelola desa termasuk juga posisi desa sebagai pemilik objek wisata. Untuk merealisasikan hal ini diperlukan kebijakan yang lebih tinggi dalam hal ini melalui Bupati. Guna mewujudkan hal tersebut maka dukungan semua komponen untuk menyuarkan petmasalahan tersebut menjadi penting.

Pengelola Objek wisata milik pribadi lebih fleksibel dalam mengelola dan merawat fasilitas pariwisata daripada yang dikelola oleh desa. Sebab pengelolaan objek wisara milik pribadi lebih jelas sistem pengelolaannya daripada yang dilakukan oleh desa. Hal ini terjadi karena para pekerja bertanggungjawab langsung kepada pemilik dan digaji secara jelas oleh pemilik. Ikatan kerja inilah yang mengkat sikap para pelaksana dalam pengelolaan objek wisata. Model pengelolaan seperti inilah juga yang harus diikuti oleh desa dalam pengelolaan objek wisata milik desa.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komuniaksi menjadi salah satu hal yang penting untuk terimplementasinya suatu kebijakan. Sebab dengan berjalannya komunikasi maka akan menjadikan implementor maupun kelompok sasaran dari suatu kebijakan akan dapat melaksanakan dan menerima kebijakan tersebut. Fakta lapangan

menunjukkan bahwa tidak terjalin komunikasi yang baik antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan dengan pemilik objek wisata yang ada di Pantai Kombi dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata.

Tidak berfungsinya jaringan komunikasi dalam penyampaian pesan menjadikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa pada sektor pariwisata tidak terkomunikasi dengan baik pada semua pelaku pariwisata. Dengan sendirinya maka setiap unit kerja yang berkaitan dengan sektor pariwisata akan berjalan secara sendiri – sendiri.

Sekalipun komunikasi pemerintah kecamatan dan desa baik akan tetapi kenyataannya belum banyak menyentuh pengembangan sektor pariwisata. Permasalahan – permasalahan yang ditemui dalam kaitannya dengan pengelolaan objek wisata khususnya yang dikelola oleh desa perlu diikuti dengan kebijakan yang jelas dan kerkomunikasi sampai pada level pelaksana di lapangan.

Hal yang baik pada komunikasi pemerintah desa dengan pihak keamanan (Polsek) sangat baik dalam pengamanan objek wisata dan kegiatan pengunjung. Merupakan modal baik untuk membentuk pola komunikasi dalam pengembangan objek wisata mulai dari pihak Pemerintah Kabupaten Minahasa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan pemilik objek wisata pribadi. Hal ini sejalan dengan yang telah dilakukan oleh pemilik objek wisata pribadi dalam menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pihak kepolisian.

Permasalahan komunikasi antar organisasi pelaksana juga berdampak pada adanya ketersediaan informasi tentang penggunaan fasilitas dan pengelolaannya sangat baik untuk objek wisata milik pribadi dan belum terlalu baik dan belum tertata untuk objek wisata milik desa. Sistem dan mekanisme pengelolaan informasi

mencerminkan baik buruknya komunikasi antar organisasi dalam pengelolaan objek wisata. Menjadi sangat penting bagi semua stakeholder untuk bersama membangun komunikasi yang baik agar sektor pariwisata di Kabupaten Minahasa benar - benar mmenjadi sektor andalan dalam memajukan daerah, menarik investor dan meningkatkan pendapatan sehingga kerinduan untuk menjadikan masyarakat Kabupaten Minahasa sejahtera dan merata pembangunan dapat terwujud.

6. Lingkungan Ekonomi dan Sosial

Telaah mengenai lingkungan kebijakan dalam studi ilmpelentasi kebijakan publik menjadi sorotan dewasa ini. Karena dar berbagai penelitian yang dilakukan bahkan pengembangan teori implementasi kebijakan dewasa ini banyak mengaitkan dengan lingkungan kebijakan. Lingkungan kebijakan memiliki peran yang juga penting untuk berhasilnya implementasi kebijakan. Pada penelitian ini lingkungan kebijakan lebih difokuskan pada lingkungan ekonomi dan sosial masyarakat dimana kebijakan tersebut diimplementasikan.

Masyarakat Kecamatan Kombi sapai dengan saat ini masih menggantungkan aktivitas pekerjaan pada sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena sejak dahulu Kecamatan Kombi telah dikenal dengan daerah penghasil cengki terbesar di Kabupaten Minahasa dan Provins Sulawesi Utara. Akibatnya sektor pariwisata belum banyak berkontribusi pada penguatan ekonomi masyarakat. Hal ini menjadi nyata karena masyarakat belum banyak melibatkan diri secara usaha dan profesi di bidang pariwisata.

Masyarakat yang masih banyak memfokuskan pemenuhan kebutuhan pada sektor pertanian. Karena juga didukung dengan wilayah pertanian yang sangat luas di Kecamatan Kombi. Demikian juga dengan kemampuan kerja yang dimiliki oleh masyarakat yang sejak dahulu kala sudah berprofesi sebagai petani. Sekalipun memang

potensi alam dalam hal ini laut yang cukup baik, akan tetapi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan hanya sedikit dan bukan merupakan profesi utama masyarakat.

Demikian pula halnya dalam memanfaatkan sektor pariwisata untuk menunjang perekonomian masyarakat seperti membuat dan menjual kerajinan tangan yang dapat dipasarkan ke pengunjung di objek wisata maupun dalam hal pengelola usaha rumah makan di sekitar objek wisata. Usaha ekonomi kerakyatan yang demikian belum terlihat diguluti oleh masyarakat Kecamatan Kombi. Keadaan ini memang tidak dapat disalahkan karena fakta lapangan juga menunjukkan bahwa para wisatawan yang berkunjung di pantai Kombi masih bersifat musiman. Akan ada kunjungan pada hari libur atau hari minggu, sementara untuk hari kerja sangatlah kurang. Keadaan ini yang membuat masyarakat tidak memiliki keberanian yang lebih baik dalam mengguluti profesi penunjang sektor pariwisata.

Hal yang dianggap baik dari lingkungan kebijakan yaitu pada kondisi sosial masyarakat. Masyarakat yang berada di Kecamatan Kombi secara umum dan khususnya yang bermukim di sekitar pantai sangat ramah, baik dan terbuka. Keadaan ini sangat menunjang terciptanya keamanan bagi para pengunjung yang datang berwisata di pantai Kombi. Demikian pula halnya dengan pola interaksi sosial masyarakat yang terbuka, suka bergaul, ramah dan santun di Kecamatan Kombi yang baik menjadi modal bagi pengembangan sektor pariwisata di daerah ini. Kondisi lingkungan sosial yang seperti ini diharapkan terus terjaga dan ada di daerah pariwisata.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan melalui aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi dan sosial belum dilakukan dengan baik pada pengelolaan objek pariwisata alam Pantai Kombi di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Keadaan ini terjadi karena :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa belum memiliki kebijakan yang menjadi dasar hukum yang jelas dalam pengembangan pengelolaan objek wisata di Pantai Kombi.
2. Sumberdaya manusia pengelolah objek wisata milik desa belum memiliki kemampuan yang baik serta belum didukung dengan ketersediaan fasilitas penunjang dan anggaran untuk pengelolah objek wisata menjadi lebih baik. Keadaan ini berbeda dengan pengelolaan objek wisata milik pribadi yang memiliki sumberdaya manusia yang cukup profesional, fasilitas objek wisata yang lebih baik serta pengelolaan anggaran yang profesional.
3. Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa yang tertata dengan baik belum mampu merumuskan dan memprogramkan pembangunan yang menunjang pengelolaan objek wisata alam pantai Kombi sebagai salah satu destinasi wisata alam yang menjanjikan sebagai akibat dari sistem perencanaan dan penganggaran daerah yang terjadi saat ini.
4. Sikap terbuka yang ditunjukkan oleh pimpinan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa untuk memberikan kewenangan kepada desa pemilik objek wisata dalam pengelolaan

model desa wisata belum menjadi program Pemerintah Kabupaten Minahasa.

5. Komunikasi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan dengan pemilik objek wisata yang ada di Pantai Kombi dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata belum berjalan dengan baik.
6. Masyarakat yang ada di sekitar objek wisata pantai Kombi belum menjadikan sektor pariwisata sebagai profesi untuk mendukung perekonomian keluarga karena kunjungan wisata belum secara periodik terjadi setiap hari.

Saran

Untuk terimplementasikannya kebijakan pengelolaan objek pariwisata alam Pantai Kombi di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara melalui aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi dan sosial maka disarankan untuk melakukan perbaikan dalam hal :

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa harus menetapkan kebijakan yang menunjukkan pada prioritas pembangunan sektor pariwisata di wilayah Kecamatan Kombi sebagai pedoman pelaksanaan bagi setiap unit kerja yang berkaitan dengan sektor pariwisata.
2. Perlunya pembentukan unit kerja di desa seperti BUMDes yang terfokus sebagai pengelola objek wisata.
3. Perlunya program pembangunan yang tertata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa untuk pengembangan sektor pariwisata Pantai Kombi.
4. Pemerintah Desa selaku pemilik objek wisata harus berani menetapkan desanya sebagai desa wisata dan didukung dengan

program kerja pemerintahan yang terfokus pada pengelolaan pariwisata.

5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa harus membentuk forum komunikasi pengelola objek wisata di wilayah Kecamatan Kombi.
6. Masyarakat harus berani mengambil peluang usaha di sektor pariwisata sebagai penunjang perekonomian keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2016. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfa Beta.
- Admosudirjo. 2005. Manajemen Pendidikan Indonesia, Jakarta: PT. Ardadizya Jaya
- Jones, Charles O. 1996. An Introduction To The Study of Public Policy, diterjemahkan oleh Ricky Irianto, Cet 3. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Kawengian F. F. D. J. Lengkong, J. D. Pombengi. 2018. Perencanaan Pembangunan Sektor Pariwisata di Kabupaten Minahasa Tenggara. ejournal.unsrat.ac.id.
- Lengkong. F. D. J, P. Rumapea, F. M.G. Tulus. 2018. Kemampuan Aparat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Kecamatan Tatapaan dan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan). Laporan Penelitian : Manado : LPPM Unsrat.
- Lengkong. F. D. J. Tulus, F. M.G dan Ruru. J.M. 2019. Implementasi Kebijakan Desa Wisata di Kabupaten Minahasa Selatan. Laporan Penelitian : Manado : LPPM Unsrat.
- Lamadau Sri Nanda. F. D. J. Lengkong, S. Dengo. 2017. Strategi Implementasi Program Ekowisata di Kota Manado. ejournal.unsrat.ac.id
- Londa, V.Y. 2016. Implementasi Kebijakan Pendidikan dasar Daerah Kepulauan (Studi di Kabupaten Kepulauan Talud Provinsi Sulawesi Utara). Sosiohumaniora. Jurnal Ilmu – Ilmu

Sosial dan Humaniora. Vol.18(3). 263-271.

- Londa, V.Y & Dengo, S. 2017. Kebijakan Publik. Manado : Lembaga Penelitian & Pengembangan Pembelajaran Unsrat.
- Mazmanian, Daniel A. and Paul A. Sabatier, 1983, Implementation and Public Policy, Illinois : Scott, Foresman and Company.
- Miles, M dan M. Huberman. 1984. Qualitative Data Analysis: A Source Book of new Methods, Beverly Hills, CA; Sage Publication.
- Moekijat. 2000. Kamus Manajemen, Bandung : Mandar Maju.
- Moleong, Lexy. J., 1997., Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja
- Nugroho. R. dan Dwijowijoto, 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Pitana. I. G. dan Diarta, I. K. S. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta : Andi.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press.
- Subarsono, A.G. 2005. Analisis Kebijakan Publik : Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Subarsono, 2005
- Terry R. G. 2009. Prinsip-Prinsip Manajemen cetakan 10. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan
- Yoeti, Oka, A., 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa.
- _____. 1996. Pemasaran Pariwisata Terpadu. Bandung: Angkasa.